

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, 2008.

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Wijoyo, Suparto, *Otonomi tanpa Politik Ekologi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009.

Wijoyo, Suparto, *Hukum Lingkungan; Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, 2005.

Winarsih, Sri, Wilda Prihatiningtyas, *Buku Ajar Pemerintahan Daerah*, Airlangga University Press, 2019.

### Jurnal

Akib, Muhammad, 'Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah', *Jurnal Media Hukum*, Vol 19, No 2, 2012.

Hutasoit, Wesley Liano, 'Analisa Pemindahan Ibukota Negara', *Jurnal Dedikasi*, Vol 19, No 2, 2018.

Silalahi, Sahat Aditya Fanditya, 'Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara', *Jurnal INFO Singkat*, Vol 11, No 16, 2019.

Sodikin, 'Penegakan hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan', *Kanun Jurnal Hukum*, Vol 12, No 3, 2010.

Sulistiyono, 'Pengaruh Izin Lingkungan sebagai Upaya Preventif terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup', *Jurnal Swara Patra*, Vol 6, No 4, 2016.

Sutrisno, Bambang, 'Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah', *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No 17, 2013.

Yahya, H.M, 'Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera', *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol 14, No 1, 2018.

### **Peraturan Perundang-undang**

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

